



PROVINSI BENGKULU

RABU, 08 JULI 2020

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tuntut LHP BPK Dibagikan

BENGKULU - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menuntut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dibagikan kepada masing-masing dewan. Hal ini disampaikan di tengah jalannya sidang rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (7/7).
 "LHP yang diserahkan BPK kita minta dibagikan. Kawan-kawan juga butuh untuk dikonsumsi. Kita minta copian karena ini menyangkut pembahasan laporan pertanggungjawaban gubernur kedepan," kata anggota DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi saat interupsi usai Sekdaprov Hamka Sabri membacakan jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin.
 Hal yang sama juga diminta oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu Herizal Apriansyah. Menurutnya LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 yang serahkan dalam rapat paripurna adalah milik DPRD termasuk anggota dewan lainnya. Bukan hanya milik pimpinan DPRD saja.
 "Kita juga minta Pak Sekda agar menginstruksikan kepada OPD untuk ha-

dir ke DPRD kalau diundang, jangan sekedar diwakili. Pengalaman, kalau bahas anggaran semangat tapi untuk pertanggungjawaban sepeertinya berat," tukasnya.
 Sementara itu jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 209 disampaikan oleh Sekdaprov Hamka Sabri. "Kami menyadari masih ada kekurangan dalam jawaban dan tanggapan serta penjelasan ini. Apabila masih ada hal-hal memerlukan uraian lebih rinci, dan diperlukan jawaban serta penjelasan secara teknis dan lebih luas dapat dibahas dalam pertemuan dengan komisi-komisi maupun forum lainnya," beber Sekda.
 Menanggapi adanya perbedaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara laporan disampaikan gubernur dalam nota penjelasan sebelumnya dan audit BPK, kata Hamka, hanya terdapat pada perbedaan item-item yang disampaikan. Angka SiLPA merupakan angka pasti yang tidak dapat direkayasa. Dan angka SiLPA tersebut telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu. an-

gka SiLPA yang disampaikan pada saat refocusing sebesar Rp 9 miliar lebih ada di kas daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang merupakan bagian dari SiLPA.
 Kemudian kas di BLUD Rp 500 juta lebih dan kas di BOS sebesar Rp 19 miliar lebih menjadikan SiLPA sebagaimana yang telah disajikan dalam nota penjelasan Gubernur Bengkulu dan raperda serta rapergub. Kas di BLUD merupakan dana yang dikelola langsung oleh BLUD dan kas di bos merupakan dana yang dikelola bendahara di sekolah-sekolah yang berdasarkan Permendiknas Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS BAB VI Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa sisa dana bos pada sekolah tetap digunakan oleh sekolah.
 Sedangkan angka SiLPA Rp 100 miliar lebih dari pertemuan komisi dengan mitra kerja merupakan angka sisa anggaran yang tidak terealisasi bukan merupakan SiLPA. "SiLPA Rp 29 miliar lebih yang disampaikan dalam nota penjelasan gubernur lalu, itu merupakan gabungan dari item-item dari sisa anggaran yang ada termasuk di BLUD dan BOS," demikian Hamka. (key)